

BAB I

PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang Masalah

Masa reformasi adalah masa pemerintah yang sedang membangun sistem pemerintahan yang baru, dimana masa sebelum reformasi seluruh kebijakan berasal dari pemerintahan pusat, daerah harus menerapkan tanpa mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut cocok untuk daerahnya atau tidak. Setelah tergulingnya masa orde baru maka masa reformasi adalah harapan baru bagi bangsa Indonesia sehingga tidak heran banyak harapan yang menginginkan perubahan mulai dari bawah sampai ke atas atau biasa disebut dengan istilah *bottom-up*. *Bottom-up* adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh elemen yang terlibat seperti masyarakat, swasta, pemerintahan, LSM, sehingga perencanaan pembangunan tersebut memang benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan keinginan masyarakat di daerah tersebut. Masa reformasi membuat gambaran tentang dirinya sebagai masa pemerintahan yang menggunakan sistem demokrasi. Demokrasi bukanlah hal yang baru di Indonesia, dimasa orde baru demokrasi sudah diterapkan tapi pemerintahan yang demokratisasi yang belum diterapkan.

Menurut *Stein Ringen* dalam bukunya, *What the Democracy For* (2007), menyatakan bahwa demokrasi adalah sebuah kemenangan. Hal yang

dimaksud oleh *Stein* adalah banyaknya negara berkembang yang mengimani demokrasi. Demokrasi dianggap salah satu sistem yang cocok di negara yang sedang berkembang, karena demokrasi memberikan ruang yang cukup luas untuk kebebasan individu, hal tersebut memberikan dampak baik dalam hidup bermasyarakat, tidak ada rasa takut untuk berekspresi, dapat memberikan pendapat, serta demokrasi juga menjamin hak-hak individu sehingga keamanan untuk masyarakatpun tercipta dengan dianutnya sistem pemerintahan yang demokrasi. Demokrasi dinegara berkembang bukan hanya sebuah cara atau proses, melainkan tujuan berbangasa dan bernegara.

Diamond (2003), mengatakan ada lima alasan kenapa negara berkembang memilih demokrasi. *Pertama*, demokrasi memberikan ruang gerak yang bebas dalam berpendapat dalam hal apapun, pembungkaman pendapat sudah pastilah sebuah anti-demokrasi, sehingga dengan di berikan kebebasan individu maka harapannya akan terbentuk politik yang beradap dan berkualitas. Dengan kebebasan individu maka terbentuklah partisipasi politik yang aktif, salah satunya terbentuklah pengawasan politik.

Kedua, oleh sebab itu kontrol politik bukan saja dilakukan oleh orang-orang yang berada didalam pemerintahan, tetapi juga akan lebih baik jika pengawasan dilakukan oleh yang diluar pemerintahan. Kemajuan negara bukan ditentukan oleh pemerintah saja, tetapi juga bergantung bagaimana proses pengawasan yang berlangsung antara pemerintah dan masyarakat. Pengawasan politik diluar pemerintah adalah proses demokrasi pemerintahan.

Pada masa orde baru pengawasan hanya terjadi di dalam pemerintahan saja, diluar pemerintahan tidak dapat memberikan masukan dan pengawasan.

Ketiga, demokrasi menyediakan ruang untuk pergantian kekuasaan, sehingga tidak ada pemerintah yang akan bertahan sangat lama menjadi seorang pemimpin. Demokrasi mengatur berapa lama seorang pemimpin boleh menjabat, hal ini perlu dilakukan agar terhindar dari monopoli kekuasaan.

Keempat, tersedianya suatu mekanisme pengelolaan dan penyelesaian konflik yang baik. Dengan adanya kompetisi maka permasalahan adalah hal yang tidak bisa dihindarkan, seperti kecurangan dan kekerasan (konflik destruktif). Karena itu, demokrasi harus bisa menghadirkan penyelesaian konflik yang baik secara teknis, sehingga permasalahan bisa diminimalisir.

Kelima, demokrasi menjamin hak warganya dan juga memberikan keamanan kepada setiap warganya tanpa memandang status sosial. Hal ini mengharuskan pemerintah untuk membuat suatu regulasi hukum yang menjamin itu semua.

Dari ulasan diatas, Indonesia termaksud negara berkembang yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Sebelumnya, Indonesia belum berhasil menerapkan demokrasi yang seutuhnya, namun sekarang Indonesia mencoba untuk menciptakan demokrasi seutuhnya. Salah satu yang dilakukan Indonesia dengan memberikan otonomi daerah. Otonomi daerah dianggap cocok untuk Indonesia melihat luas negara dan keberagaman suku serta budaya yang berada di Indonesia sehingga kepentingan dan keperluan setiap

daerah pasti akan sangat jauh berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. F. Sugeng Istianto mengatakan, otonomi daerah merupakan suatu hak dan wewenang yang diberikan pusat kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Indonesia mengeluarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah sebagai acuan kepala daerah. Didalam UU tersebut dibahas daerah dapat mengatur rumah tangganya sendiri.

Terbentuknya UU No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah menguntungkan daerah-daerah yang berada di Indonesia, salah satu daerah yang diuntungkan yaitu Provinsi Aceh. Dengan adanya UU tersebut Aceh bisa mengurus sendiri kebutuhan daerahnya sehingga tidak ada lagi alasan bagi pemerintahan daerah Aceh untuk tidak mengelola kekayaan yang ada di Aceh, sehingga bisa menyejahterakan masyarakat Aceh. Elit-elit politik yang berada didalam maupun diluar Aceh menganggap tidak cukup hanya dengan diberikan otonomi daerah, elit-elit politik di Aceh beranggapan Aceh harus membentuk partai lokal. Dengan adanya partai lokal tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di Aceh beranggapan akan bisa memilih orang asli Aceh sebagai pemimpin di Aceh, dengan harapan apabila pemimpin Aceh adalah orang yang berasal dari Aceh itu sendiri tentunya dapat lebih tahu apa yang di perlukan rakyat Aceh.

UU Otonomi Khusus dibentuk untuk Aceh yaitu UU No 18 Tahun 2001. Dalam undang-undang dijelaskan bahwasannya Aceh dapat mengatur daerah, ekonomi, dan lain sebagainya demi mensejahterakan rakyat Aceh. Masih ada keinginan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang belum terpenuhi didalam UU

tersebut yaitu mengenai pemerintahan sendiri (*Self Government*) atau biasa sekarang dikenal dengan partai lokal. Isu ini sudah terdengar sejak pemerintah pusat dipimpin oleh Abdurrahman Wahid, sayangnya hal ini tidak ditanggapi dengan serius pada saat itu (Hamid, 2008, hal. 209).

Ada beberapa pertemuan yang dilakukan agar Aceh tidak memisahkan diri dari Indonesia, pertemuan-pertemuan tersebut ialah untuk menyepakati apa yang diinginkan oleh Aceh. Ada beberapa perjanjian yang telah dilakukan, perjanjian yang terakhir dilakukan dengan nama Perjanjian Penghentian Permusuhan atau *Cessation of Hostilities Framework Agreement (CoHA)*. Dalam perjanjian ini ada beberapa hal yang disepakati dalam perjanjian tersebut, yaitu : (i) penghentian dan tindak kekerasan pada tahun 2002; (ii) akan diadakan musyawarah terbuka dan pertemuan yang transparan pada tahun 2002 dan 2003; dan (iii) pada Mei 2004 akan diadakan pemilihan kepala daerah di Aceh dengan demokratis. Sayangnya perjanjian ini gagal diterapkan dilapangan karena kesalahpahaman antara TNI dan GAM sehingga hal tersebut kembali menimbulkan gejolak diantara masyarakat Aceh dan Pemerintah Pusat. Kegagalan perjanjian CoHA pada Mei 2003 menjadikan Aceh kembali dalam status darurat militer selama setahun dan juga disusul dengan status darurat sipil selama setahun. Aceh dan Pemerintah Pusat masih bersitegang, tapi seakan Tuhan memberikan peringatan untuk masyarakat Aceh dan Pemerintah Pusat dengan terjadinya bencana alam Tsunami di Aceh. Untuk memudahkan segala hal yang bersifat pembangunan pasca Tsunami, pemimpin GAM dan Pemerintah Pusat kembali mengadakan pertemuan untuk

menyelesaikan permasalahan yang belum terselesaikan pada masa sebelumnya, pasca tsunami Aceh, diadakan pertemuan antara GAM dan Pemerintah Pusat yang dimediasi oleh Henry Dunant Centre (HDC). Mediasi dilakukan oleh Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Emeritus dari International Crisis Group (ICG) yang berkantor pusat di Belgia. Kantornya juga berada di beberapa negara dan salah satunya berada di Indonesia. Diadakan sekurangnya ada 5 kali pertemuan antara pemerintah pusat dan GAM dalam rangka melakukan kesepakatan dan perdamaian diantara kedua belah pihak. Hal yang paling disorot yaitu Aceh meminta pemerintah sendiri atau sering dikenal sebagai partai lokal. Hal tersebut membuat pertemuan menjadi alot dan tidak menemui kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemimpin GAM (Hamid, 2008, hal. 210-211).

Pemerintah pusat beranggapan hal tersebut bertentangan dengan UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Polemik terus terjadi diantara kaum intelektual pada saat itu. Ada yang menyetujui dan ada juga yang tidak. Bagi mereka yang menyetujui, hal tersebut adalah hal yang wajar dan tidak perlu ditakutkan secara berlebihan mengenai hadirnya partai lokal yang akan dibentuk di Aceh. Partai lokal adalah suatu hal yang biasa terjadi di suatu sistem pemerintahan yang menganut sistem demokrasi. Hal yang harus dilakukan pemerintah pusat adalah membuat aturan untuk partai lokal agar tidak bersebrangan dengan ideologi negara dan menjadi gerakan separatis.

Menurut Harry Tjan Silalahi, salah satu peneliti Centre For Strategic and International Studies (CSIS) berpendapat bahwa sering terjadi perdebatan

antara pengurus partai yang di daerah dan di pusat, salah satu perdebatan yang terjadi ialah pencalonan kepala daerah. Indonesia sudah menganut sistem pemerintahan yang desentralisasi, sehingga pembentukan partai lokal adalah hal yang wajar, sangat aneh jika sistem pemerintahan yang desentralisasi masih melakukan rekrutmen calon pemerintah daerah yang bersifat sentralistik (Hamid, 2008, hal. 223).

Berbeda dengan pendapat Harry, pakar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Riswandha Imawan berpendapat, terbentuknya partai lokal adalah sebuah kemunduran bagi Indonesia. Wacana pembentukan partai lokal diharapkan tidak hanya karena keinginan GAM saja, jika partai lokal dikabulkan maka harus dibuat UU baru yang mengatur tentang partai lokal (Hamid, 2008, hal. 219).

Setelah melalui perjalanan panjang akhirnya pemerintah pusat menyetujui keinginan GAM tentang pemerintahan sendiri atau pembentukan partai lokal. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (RUU PA) tidak memakan waktu yang lama, yakni memakan waktu selama 7 bulan. Pada 1 Agustus 2006 Susilo Bambang Yudhoyono selaku presiden menandatangani menjadi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Berbeda dengan latar belakang terbentuknya partai lokal di Aceh yang terbentuk atas kebutuhan daerah Aceh, partai Gerindra terbentuk untuk masyarakat Indonesia secara luas. Walaupun pada masa ini masyarakat Indonesia sudah tidak terlalu percaya dengan partai politik, tetapi partai Gerindra tidak gentar dengan anggapan tersebut. partai Gerindra yakin

mereka akan berbeda dari partai politik yang telah ada dan akan berpihak kepada masyarakat untuk membangun Indonesia ke yang arah lebih baik.

Setelah diatas membahas latarbelakang terbentuknya Partai Aceh, dipembahasan selanjutnya akan membahas apa itu koalisi dan mengapa kedua Partai ini berkoalisi. Disamping berdirinya partai-partai politik, tidak jarang antara kedua partai yang berbeda melakukan sebuah koalisi yang mana memiliki tujuan untuk kemaslahatan bersama. Menurut definisi, kata koalisi merupakan penyatuan dua atau lebih partai politik demi mencapai satu kesepakatan yang saling menguntungkan, koalisi biasa sering terjadi saat menjelang pemilihan baik itu pemilihan daerah atau pemilahan umum presiden. Adapun koalisi menurut Yudha Hariwardhana (2006), persekutuan, aliansi, atau gabungan dari beberapa unsur, hal ini dilakukan berlandaskan manfaat dan biasanya bersifat sementara. Koalisi pada awalnya sering dilakukan pada saat pilkada atau pemilu, tetapi seiring perkembangan zaman koalisi juga terjadi untuk pembagian kursi dikementrian tingkat pusat dan kepala dinas untuk tingkat daerah, bahkan juga dilakukan saat pengesahan rancangan undang-undang oleh DPR. Jadi dapat dilihat bahwa koalisi terbentuk tergantung pada kondisi yang ada, maka dapat dipastikan bentuk koalisi akan berubah sesuai situasi dan keuntungan bagi partai.

Koalisi pada zaman ini sudah menjadi hal yang biasa bahkan bisa dikatakan hal yang pasti dilakukan oleh partai politik. Koalisi menjadi hal yang lumrah dilakukan karena dengan adanya koalisi, kedua belah pihak mampu mendapatkan keuntungannya masing-masing. Koalisi dilakukan oleh

partai-partai tertentu agar memenangkan kandidat calon kepala daerah atau presiden yang diusungnya. Dengan dilakukannya koalisi, maka dapat mempermudah jalan kandidat terpilih untuk memenangkan pemilihan. Janji-janji politik biasanya akan dilakukan sebelum melakukan koalisi, jika perjanjian yang dilakukan pihak-pihak yang ingin melakukan koalisi dirasa cocok, maka kesepakatan berkoalisi baru dilakukan.

Diatas telah disinggung pengertian koalisi dan manfaat dari berkoalisi. Selain dua hal diatas ada alasan yang penting mengapa partai politik biasanya berkoalisi. Salah satu alasan mengapa partai melakukan koalisi yaitu karena dengan berkoalisi dana untuk melakukan kampanye akan dapat sedikit diringankan, karena untuk mempromosikan calon memerlukan dana yang besar, apalagi calon yang diusung merupakan orang baru dipolitik dan belum banyak masyarakat yang mengenal, sehingga untuk memperkenalkannya antara lain dengan cara memasang iklan, memberitakan dimedia cetak, membayar saksi, pakaian, dan hal-hal lain yang diperlukan akan memakan biaya yang besar. Ketua umum Gerindra, Prabowo mengatakan dana yang dihabiskan untuk menjadi pasangan calon terpilih, salah satu contohnya untuk menjadi calon kepala daerah terpilih dapat menyentuh angka sebesar 300 juta rupiah. Bisa dipastikan dengan melakukan koalisi, dana yang dikeluarkan akan lebih sedikit sehingga partai akan diringankan karena ada bantuan yang diberikan oleh partai-partai yang merupakan rekan koalisinya.

Koalisi juga sekarang sudah semakin sering terjadi ditingkatan daerah, karena pemerintahan daerah pada masa ini memiliki kekuatan yang besar di

daerah, partai di daerah mempunyai kebebasan berkoalisi dengan partai mana saja, tidak seperti pada masa orde baru daerah harus mengikuti pusat dan juga pada masa itu tidak banyak partai bermunculan. Berbeda dengan masa orde baru, dimana pada masa orde baru segala kebijakan ditentukan oleh pusat, namun setelah diberikan otonomi daerah hal demikian tidak terjadi kembali. banyak partai yang berminat untuk dapat berkuasa menjadi kepala daerah, karena partai mengerti betul hal tersebut tidak mudah jika berjalan sendiri oleh sebab itu koalisi merupakan salah satu cara untuk dapat menguasai daerah.

Partai Aceh juga sadar, dimasa sekarang perlu untuk melakukan koalisi, namun koalisi yang dilakukan oleh Partai Aceh bukanlah sepenuhnya diperuntukan untuk kepentingan menduduki kekuasaan di daerah, melainkan koalisi yang dilakukan adalah untuk menaikkan kader partai Aceh ke tingkatan pusat yaitu di DPR RI. Dengan demikian maka Partai Aceh melakukan koalisi dengan partai nasional karena dengan melalui partai nasional, Partai Aceh bisa berkompetisi ditingkatan pusat. Partai Aceh memilih partai Gerindra sebagai kendaraan politik untuk bisa menjadikan kadernya menjadi anggota DPR RI. Hal tersebut merupakan salah satu alasan dari banyak alasan kenapa partai Aceh melakukan koalisi. Sedangkan untuk partai Gerindra, keuntungannya ialah bisa masuk di DPRA dan DPR ditingkatan kota/kabupaten lebih banyak dari masa sebelum berkoalisi. Alasan politik yang lain adalah daerah di Aceh beberapa tempat dikuasai oleh partai Aceh sehingga yang bisa memajukan Aceh yaitu partai Aceh, kata Prabowo.

Koalisi yang terjalin antara Partai Gerindra dengan Partai Aceh sudah terjadi pada tahun 2012 saat pesta demokrasi tingkat daerah yaitu pemilu Gubernur, kerja keras pihak Partai Aceh dan koalisinya berhasil menjadikan Zaini Abdullah menjadi Gubernur Aceh. Inilah awal mula koalisi yang terjalin diantara kedua belah pihak, selanjutnya koalisi ini kembali saling bahu membahu dalam memenangkan pasangan calon Presiden Prabowo. Hasilnya Prabowo berhasil memenangkan pemilu Presiden di Aceh, Aceh Utara yang diteliti adalah daerah yang terbesar dari kabupaten/kota yang ada di Aceh, di Aceh Utara pasangan Presiden Prabowo dan Hatta berhasil mengungguli pasangan Jokowi dan JK. Dari data Komisi Independen Pemilihan (KIP), untuk Aceh Utara Prabowo memperoleh suara sebanyak 125.359 sedangkan Jokowi mendapatkan perolehan suara sebesar 82.486, Prabowo berhasil menang di 17 kabupaten/kota dan Jokowi hanya berhasil menang di 7 kabupaten/kota.

Ketua Partai Aceh adalah Muzakkir Manaf mantan kombatan GAM yang sangat berpengaruh dalam pemberontakan yang dipimpin oleh Hasan Tiro, sehingga Muzakkir tidak akan main-main dalam berkoalisi melihat apa yang diberikan oleh Partai Gerindra sangat menguntungkan Partai Aceh dan juga rakyat Aceh. Yaitu memberikan UU PA sepenuhnya untuk Aceh dan juga memberikan kesempatan bagi kader Partai Aceh yang ingin menjadi anggota DPR. Dengan power yang dimiliki oleh Muzakkir tidak terlalu sulit untuk menyatukan pandangan untuk mengukung Prabowo, tidak ada pengurus partai yang menolak untuk bergabung dengan Partai Gerindra. TA Khaled adalah

ketua dari Partai Gerindra beliau adalah teman diskusi Muzakkir, melihat kedekatan ini sudah pasti koalisi ini akan berjalan dengan lancar, bedanya TA Khaled tidaklah begitu terkenal dikalangan masyarakat Aceh.

Partai yang berkoalisi untuk mendukung Prabowo di Aceh sama dengan Provinsi lain, bedanya di Aceh ada partai lokal yang mendukung Prabowo sehingga partai yang berkoalisi untuk mendukung Prabowo menjadi 8 partai sedangkan di Provinsi lain 7 partai, adapun 8 partai tersebut adalah, Partai Gerindra, Partai Aceh, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional.

Partai Aceh adalah partai yang mengatasnamakan masyarakat Aceh tetapi apakah setiap kebijakan dalam partai Aceh merupakan keinginan rakyat Aceh seperti koalisi dengan partai nasional dan hal-hal yang penting lainnya. Apakah masyarakat aceh yang diluar pengurus partai pernah dilibatkan dengan cara melakukan survey, bagaimana respon dari masyarakat Aceh jika Partai Aceh berkoalisi dengan partai nasional. Penelitian ini akan mencoba membahas apakah koalisi yang terjadi dengan partai Gerindra merupakan keinginan rakyat Aceh atau ini hanya kepentingan kelompok saja. Disini penelitian dikhususkan pada daerah Aceh Utara melihat Aceh Utara yang memiliki kekayaan alam yang bervariasi, sehingga banyak mendatangkan investor baik dalam maupun luar negeri, sudah dapat dipastikan partisipasi politik di daerah Aceh Utara akan sangat bervariasi karena di Aceh Utara yang bermain ditingkat daerah bukan hanya elit politik daerah saja (*strong men*),

tetapi ada pengusaha luar daerah Aceh sehingga hal tersebut mempengaruhi politik di Aceh Utara.

Hal yang ingin diketahui didalam penelitian ini adalah mengapa partai Aceh harus berkoalisi dan mengapa harus berkoalisi dengan partai Gerindra. Partai Aceh terlahir dari perjuangan yang mana perjuangan tersebut untuk menyejahterakan masyarakat Aceh. Selain hal tersebut penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana cara pola pikir tokoh elit politik di Aceh Utara. Ketakutan yang terjadi apabila menjalin koalisi dengan partai nasional akan menghilangkan poin-poin penting yang sebelumnya diperjuangkan oleh partai Aceh dan hal yang paling mengerikan apabila partai Aceh menjadi partai politik yang pragmatis. Agar tidak terjadi pemikiran yang negatif mengenai partai Aceh, oleh sebab itu penelitian ini dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana peran elit politik Aceh Utara dalam koalisi Partai Aceh dengan Partai Gerindra pada pemilu presiden tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini tidak lain adalah mengetahui bagaimana peran elit di Aceh Utara, dengan mengetahui peran elit di Aceh Utara maka bisa diketahui tujuan dilakukan koalisi dengan partai Gerindra.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh setelah dilakukan penelitian, antara lain :

A. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian yang dilakukan dapat menjadi manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu pemerintahan. Selain itu, harapannya penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa/i untuk kedepannya khususnya di bidang politik.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk teori peran elit politik di Partai Aceh, agar menjadikan Partai Aceh menjadi partai politik yang lebih baik untuk kedepannya.

B. Manfaat Praktis

a. Elit Partai Aceh

Secara praktis dapat memberikan masukan untuk elit Partai Aceh, untuk meninjau kembali apakah kebijakan untuk berkoalisi dengan partai nasional memberikan dampak yang baik terhadap partai.

b. Masyarakat

Memberikan pengetahuan ilmu kepada masyarakat Aceh pada khususnya alasan elit politik Partai Aceh bergabung dengan partai nasional.

c. Peneliti

Menyumbangkan ilmu pengetahuan khususnya bagi peneliti secara pribadi dan Juga Kepada jurusan Ilmu Pemerintah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

E. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang tidak seluruhnya sama yang telah dilakukan sebelum penelitian ini dilakukan. Penelitian terdahulu menjadi panutan untuk penelitian yang dilakukan sekarang ini serta juga menjadi sumber yang akurat karena diambil dari penelitian yang terpercaya. Ada beberapa fokus yang akan dibahas dalam penelitian yang baru ini seperti, kalkulasi elit, dan perilaku politik partai lokal. Berikut akan dipaparkan beberapa penelitian yang terdahulu yang relevan dengan penelitian ini :

1. Penelitian Nefa Andrian tentang Komunikasi Elit Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014. Penelitian ini mencoba menjelaskan proses komunikasi elit yang terjadi di Rokan Hilir. Dimana sewajarnya yang berhasil menang di Kabupaten tersebut adalah pasangan Prabowo dan Hatta tetapi malah sebaliknya pasangan Prabowo dan Hatta kalah di Kabupaten Rokan Hilir. Ini sangat mengejutkan dimana koalisi pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla hanya mendapatkan 17 kursi dalam Pemilihan Umum tahun 2014, sedangkan koalisi partai pendukung pasangan Prabowo dan

Hatta mendapatkan 25 kursi dari 45 kursi yang tersedia di dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Jika dilihat dari posisi tersebut akan sangat menguntungkan bagi pasangan Prabowo dan Hatta, tetapi semua diluar dugaan pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla malah mengungguli perolehan suara di Rokan Hilir.

Kejadian ini bisa terjadi karena ada kesalahan komunikasi elit yang terjadi Rokan Hilir, ada kesepakatan dan pembicaraan yang serius dibalik kekalahan Prabowo. Sehingga penelitian ini membahas lebih dalam apa permasalahan yang terjadi yang mengakibatkan kekalahan ini terjadi. Penelitian ini menganggap kesalahan terjadi baik didalam dan luar komunikasi elit. Komunikasi yang tidak terjalin dengan baik akan mengakibatkan kegagalan dalam pemilihan presiden.

2. Penelitian selanjutnya adalah penelitian tentang Peran Partai politik dan Kalkulasi Elit Terhadap Karakteristik Koalisi yang dilakukan oleh Ni Wayan Indra Winasih, I Ketut Putra Erawan. Penelitian ini dilakukan di daerah Bali yaitu tepatnya di Kabupaten Karangasem dan Tabanan. Penelitian ini membahas bagaimana kalkulasi elit berlaku untuk menentukan berkoalisi dengan siapa dan akan mencalonkan siapa pada pemilihan daerah. Segala urusan sangat tertutup mulai terjadinya koalisi sampai dengan pencalonan kandidat kepala daerah. Tidak jarang koalisi sering bergonta ganti hanya untuk memenangkan kandidat yang dicalonkan, bahkan ideologi partai sering diabaikan demi politik praktis.

Bisa dikatakan pembentukan koalisi sangat terpengaruh dari peran-peran elit tokoh politik. Sangat disayangkan sikap politik elit dalam menentukan ingin berkoalisi dengan partai mana dan mencalonkan siapa, masyarakat umum tidak dilibatkan dalam hal ini sehingga masyarakat sering kali tidak mengetahui latarbelakang calon yang diusung oleh partai.

3. Skripsi mengenai Kedudukan Partai Politik Di Nanggroe Aceh Darussalam yang ditulis oleh Edwin Yustian Driyartana meneliti dari asas demokrasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang terbentuknya partai lokal di Aceh dan dampak dari terbentuknya partai lokal di Aceh. Beberapa dampak yang dialami adalah perubahan Undang-Undang mengenai partai politik, dan juga berkurangnya suara pemilih untuk partai nasional pada tahun 2009. Melihat sampai mana partai lokal dalam menangani permasalahan yang berada didaerah, banyaknya pertentangan yang terjadi saat Aceh meminta untuk membentuk pemerintahan sendiri atau biasa disebut partai lokal. Hal yang paling ditakutkan dengan terbentuknya partai lokal adalah ketidaksiapan masyarakat Aceh sendiri, dan hal yang paling dihindarkan adalah semakin masif gerakan separatis untuk berpisah dari Indonesia. Sehingga penelitian ini mengambil dari sisi demokrasi.
4. Penelitian selanjutnya yaitu mengenai Dinamika Politik Lokal di Era Otonomi Daerah yang ditulis oleh Ignatius Ismanto. Penelitian ini

dilakukan untuk melihat bagaimana peran antar lembaga pemerintahan yaitu lembaga eksekutif dan yudikatif. Pada masa orde baru kebebasan kedua lembaga pemerintahan tersebut dikekang tetapi setelah reformasi diberikan kebebasan dala menjalankan roda pemerintahan didaerah. Hal ini bisa dilihat dengan diubahnya UU No 22 Tahun 1999 menjadi UU 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah mempunyai kebebasan dalam pemerintahan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Moch. Nurhasim mengenai Dominasi Partai Aceh Pasca MoU Helsinki. Penelitian ini membahas mengapa partai Aceh menjadi penting bagi masyarakat Aceh. Selain membahas mengenai pentingnya partai Aceh untuk masyarakat Aceh, penelitian ini juga membahas bagaimana hubungan Pusat dengan Aceh dalam penyelesaian konflik yang telah lama terjadi pada masa orde baru dan diselesaikan pada masa pemerintahan reformasi. Pembentukan partai lokal di Aceh pasti akan terjadi pro dan kontra. Banyak yang tidak setuju karena akan membuat daerah lain menginginkan hal yang sama. Jika pembentukan partai lokal tidak dikabulkan maka akan sia-sia pertemuan yang telah dilakukan beberapa kali, mediasi yang dilakukan akan gagal hanya karena pusat tidak memperbolehkan keinginan GAM untuk mendirikan partai lokal.
6. Skripsi Dedy Suheimi mengenai Pencarian Informasi dan Penilaian Politik yang dilakukan di kabupaten Pidie provinsi Aceh. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penilaian masyarakat mengenai pemilu

legislatif yang dilakukan pada tahun 2014 di Aceh. Penelitian ini juga lebih memfokuskan ditingkatan desa, ada hal yang menarik dimana ada perbedaan pendapat yang terjadi diantara masyarakat desa dan kota. Masyarakat desa merasa politik di daerah sudah baik hanya politik ditingkat pusat yang belum baik, sedangkan bagi masyarakat kota politik di daerah dan ditingkat lokal masih jauh dari kata baik. sehingga penelitian ini ingin melihat lebih jauh lagi bagaimana sikap politik di desa yang berada di Pidie.

7. Perkembangan Dan Prospek Partai Politik Lokal Di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ini adalah tesis yang ditulis oleh Muhammad Jafar. Aw. Tesis yang dilakukan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perkembangan partai lokal di Aceh dalam berpolitik. Selain membahas tentang partai lokal di Aceh penelitian yang dilakukan juga mengingatkan kepada pemerintah pusat juga harus tetap berhati-hati karena dampak yang besar bisa terjadi, dampak yang mungkin terjadi adalah kemenangan di setiap daerah di provinsi Aceh, kemenangan ini terjadi karena masyarakat merasa lebih merasakan emosi yang sama dengan partai lokal dan menganggap partai lokal lebih bisa memperjuangkan hak mereka dari pada partai nasional. Dampak yang selanjutnya yang bisa saja terjadi perlawanan sekarang dilakukan melalui jalur politik bukan lagi dari jalur perang.
8. Peranan Elit Dalam Rekonstruksi Budaya Lokal “Ingot-Ingot” Di Desa Panribuan Kabupaten Simalungun salah satu penelitian yang dilakukan

oleh Albret Metro Plaza Sembiring, I Ketut Putra Erawan, dan Bandiyah. Penelitian ini membahas bagaimana tokoh elit memanfaatkan budaya ingot-ingot yang ada ditradisi batak. Bagi orang batak ingot-ingot atau didalam bahasa diartikan balas budi, tetapi sangat berbeda hal ini jika didalam budaya orang batak, karena balas budi ini sangatlah penting, melihat ada celah maka tokoh elit masuk didalamnya dan menjadikan hal ini menjadi senjata politik demi mendapatkan jabatan politik.

9. Etnisitas Dan Politik Lokal Provinsi Lampung di susun oleh Dega Okta Munaleza. Penelitian ini lebih menekankan bagaimana perbedaan etnis yang berada di Lampung, beberapa etnis yang berada di Lampung antara lain seperti etnis Lampung, Jawa, dan Bali. Perbedaan ini akan sangat terasa saat pemilu daerah dilakukan dimana partai politik mulai memasangkan pasangan calon berbeda etnis, misalkan seperti bupatinya dari etnis Lampung sedangkan wakilnya dari Jawa, ini merupakan salah satu strategi politik yang dilakukan agar bisa memenagkan pemilu didaerah.
10. Prilaku Politik Pada Demokrasi Transisi: Studi Kasus Di Provinsi Aceh Pada Pemilu 2014 di tulis Chairul Fahmi. Penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian mengenai partai lokal di Aceh pada sebelumnya, jika sebelumnya hanya membahas tentang pembentukan partai Aceh. dipenelitian ini lebih menekankan bagaimana perkembangan partai lokal didaerah pada masa pemilihan kepala

daerah di Aceh. Partai Aceh adalah salah satu partai lokal yang berdiri pertama kali di daerah Aceh. Setelah pemilu pada tahun 2012 partai Aceh tidak lagi berkoalisi dengan partai Demokrat, partai Aceh berkoalisi dengan partai Gerindra setelah memutuskan koalisi dengan partai Demokrat. Sayangnya koalisi ini tidak menghasilkan keuntungan yang besar bagi partai Aceh didalam pemilu tahun 2014, penurunan suara sebesar 35% terjadi kepada partai Aceh, partai Aceh hanya mendapat 29 kursi di DPRA dari 81 kursi, sedangkan untuk partai Gerindra hanya mendapatkan 2 kursi.

Hal kekerasan dan money politik masih sering terjadi di daerah Aceh, kekerasan dilakukan kepada rival partai Aceh atau kepada pendukungnya, hal yang sama juga dilakukan oleh rival partai Aceh terhadap anggota partai Aceh. LBH Banda Aceh mencatat ada 69 kasus kekerasan pada pemilu tahun 2014. kasus money politik juga merupakan permasalahan besar yang terjadi di Aceh. Money politik terjadi secara masif bahkan pemilih tidak segan-segan menanyakan berapa uang yang akan diberikan, kandidat yang mana yang memberikan uang lebih besar maka pemilih akan memilih kandidat tersebut. Money politik yang dilakukan beragam ada yang memberikan bantuan kepada pemilih dan lain sebagainya. Sayangnya kasus money politik di Aceh belum bisa ditangkap, karena kurangnya bukti yang ditemukan dilapangan.

Dari beberapa penelitian yang terdahulu belum ada yang membahas secara jelas bagaimana proses kalkulasi elit yang terjadi daerah Aceh Utara. Sehingga penelitian akan coba menghadirkan bagaimana kalkulasi elit yang terjadi di kota Aceh Utara. Melihat hal tersebut penelitian ini akan menjadi temuan yang baru yang belum pernah dibahas dipenelitian terdahulu.

F. Kerangka Dasar Teori

Didalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Jafar yang berjudul perkembangan dan prospek partai politik lokal di provinsi nangroe aceh darussalam, didalam penelitian tersebut sangat menarik karena membahas demokrasi dan perdamaian tidak dapat dipisahkan. Menurut *Ashutosh Varshney* didalam sistem demokrasi warga sipil bisa berkembang dilingkungan yang berbeda, dan jika terjadi pertikaian maka sistem demokrasi lebih menekankan kepada cara perdamaian. Aceh dan pemerintah pusat dari masa orde lama sama orde baru hubungan nya kurang baik, karena Aceh menginginkan merdeka sedangkan pemerintah pusat tidak memperbolehkan. Indonesia menganut sistem demokrasi dan didalam sistem demokrasi cara perdamaian lebih ditekankan dari pada kekerasan, sehingga pada masa reformasi barulah ada pembicaraan diantara pejuang Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah pusat, dari pertemuan tersebut aceh diberikan keistimewaan dengan diperbolehkannya membentuk partai politik lokal.

Didalam penelitian yang dilakukan oleh Syukrina. Dr. Effendi Hasan, MA, penelitian yang dilakukan tentang dampak dari koalisi yang dilakukan oleh Partai Aceh dengan partai gerindra, dampaknya yaitu terjadi gejolak didalam Partai Aceh. Penelitian yang dilakukan oleh Syukrina. Dr. Effendi Hasan, MA memfokuskan pro dan kontra pencalonan T.A Khalid sebagai calon wakil gubernur, T.A khalid adalah kader dari Partai Gerindra yang menjadi calon Gubernur, dan hasilnya Partai Aceh kalah pada pemilihan Gubernur tahun 2017 di Aceh.

Dari teori dan penelitian yang dibahas menganggap demokrasi adalah sistem yang menyelesaikan permasalahan dengan cara damai, dari dalam Partai Aceh sekarang sudah terjadi perpecahan maka cara demokrasi adalah satu dari sekian cara yang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Partai Aceh. Akan dibahas bagaimana semua ini bisa terjadi pada penelitian ini. Untuk memperkuat penelitian maka dibuatlah teori-teori sebagai penguat penelitian yang akan dilakukan. Teori tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Peran

Menurut Sarwono dalam Cahyono (2008) Teori peran (*Role Theory*) adalah perpaduan antara teori, orientasi, dan disiplin ilmu. Kemudian digunakan dalam ilmu sosiologi dan psikologi serta antropologi. Jika dilihat dalam dunia teater, aktor akan bermain sebagai tokoh tertentu dan diharapkan dapat melakukan seperti kondisi dan perilaku tertentu. Kemudian aktor diposisikan dalam kehidupan masyarakat, sebaliknya posisi masyarakat seperti dalam teater. Dalam keadaan ini dapat dilihat perilaku

yang diharapkan tidak dapat berdiri sendiri karena berada pada kondisi yang saling berkaitan dengan yang lainnya (aktor lain).

Menurut Sarwono dalam Andriyani (2014) peran adalah suatu pandangan dalam ilmu sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap bahwa pemeran dalam kategori sosial seperti ibu, guru, dokter dan sebagainya sebagaimana besar diambil dalam kegiatan sehari-hari.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peran adalah sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang atau lembaga yang menduduki status atau kedudukan tertentu.

a. Jenis jenis Peran

Menurut Biddle dan Thomas dalam Cahyono (2008) teori peran dibagi menjadi empat golongan, yaitu terkait dengan: a). pengambil bagian dalam interaksi sosial; b). Perilaku yang timbul dalam interaksi; c). Kedudukan dalam perilaku; serta d). Kaitan antar perilaku. Kemudian dalam pengambilan bagian dalam interaksi sosial dibagi menjadi dua yaitu : 1). aktor (pelaku), yaitu memperagakan perilaku seseorang; 2). target (sasaran) atau orang lain, yaitu hubungan aktor dengan orang lain. Dalam hal ini teori peran dapat digunakan untuk menganalisis antar hubungan baik dua orang ataupun lebih.

Berdasarkan pada pelaksanaan peranan Narwoko dan Suyanto dalam Sosiawati (2017) membagi peranan menjadi dua, yaitu :

1. Peranan yang diharapkan (*expected roles*) yaitu cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat mengharapkan pelaksanaan peranan yang dikehendaki dan peranan yang

tidak bisa ditawar dan harus dilaksanakan. Peranan jenis ini seperti peranan hakim, peranan protokoler, diplomatik dan sebagainya.

2. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*) yaitu cara bagaimana sehausnya suatu peran dijalankan. dalam pelaksanaannya peranan ini lebih fleksibel, disesuaikan dengan kondisi tertentu.

b. Aspek Peran

Menurut Scott et al. dalam Andriyani (2014) dalam memahami organisasi tentang peran-peran dalam organisasi tersebut, ada beberapa aspek penting dalam mengetahui peran yaitu sebagai berikut:

1. Peran bersifat impersonal yakni peran memposisikan diri sebagai penentu harapan.
2. Peran dengan perilaku kerja (task behavior) yaitu peran diharapkan menjadi perilaku dalam pekerjaan tertentu.
3. Peran dengan pengendalian yang sulit (role clarity dan role ambiguity).
4. Peran yang menunjukkan perubahan perilaku utama yang dihasilkan dengan mempelajari dengan cepat.
5. Peran dan pekerjaan (*jobs*). Peran dan pekerjaan memiliki perbedaan, namun dalam pelaksanaan pekerjaan seseorang dapat memiliki peran tidak hanya satu karakter namun melakukan beberapa peran.

Menurut teori peran (konsep, derivasi dan implikasi (Suhardono dalam Indriyani, 2014) seseorang dengan peranannya masing-masing seperti dokter mengobati pasiennya karena profesinya adalah dokter sebagaimana mestinya

tugas dari seorang dokter harus mengobati pasien yang mendatangnya. Perilaku ini ditentukan pada peran sosial.

c. Peran dan Dampak Terhadap Pemerintah

Peran yang dilakukan elit politik dalam berkoalisi dengan partai nasional akan berdampak terhadap kestabilan politik di Aceh, dampak yang pertama akan terjadi ialah konflik internal, konflik internal yang dimaksud adanya perbedaan pendapat antar elit politik dengan anggota partai, konflik seperti ini membuat partai Aceh kehilangan kepercayaan di masyarakat Aceh.

Turunnya kepercayaan terhadap partai Aceh akan membuat pemerintah yang diusung kehilangan legitimasinya dalam membuat sebuah kebijakan, masyarakat menganggap kebijakan yang dibuat hanyalah untuk kepentingan sekelompok saja, dan akibatnya akan terjadi ketidakstabilan politik.

Menurut Hidayat dalam Sosiawati (2017) peran dan fungsi pemerintah secara umum memiliki berbagai peranan, sebagai berikut :

1. Fungsi Pengaturan (Regulasi)

Fungsi pengaturan (regulasi) adalah fungsi pemerintah untuk membuat kebijakan baik undang-undang atau peraturan daerah yang fungsinya untuk mengatur kehidupan bersama. Fungsi pengaturan ini baik pada tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Legislasi berfungsi untuk membuat sebuah peraturan yang dibutuhkan oleh masyarakat, pembuatan kebijakan lembaga legislatif juga bisa melibatkan lembaga eksekutif, yudikatif, dan juga lembaga-lembaga yang non pemerintah untuk memberikan pandangannya.

2. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan merupakan fungsi yang dilakukan pemerintah untuk dapat mengembangkan potensi masyarakat di daerah, pemberdayaan dilakukan selain untuk manfaat di atas adalah untuk mengajak masyarakat untuk turut bersama sama dengan pemerintah membangun daerah. Ada beberapa tujuan didalam

fungsi pemberdayaan yaitu, pemberdayaan politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Pemberdayaan politik adalah pemberdayaan yang memberikan informasi apa hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, dan pemerintah dituntut untuk bisa memberikan pendidikan politik. Pada dasarnya, fungsi pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan kemampuan masyarakat disegala bidang kehidupan.

3. Fungsi Pelayanan

Dalam pemberian pelayanan terdiri dari *civil servis* dan *public servis*. *Civil service* sudah pasti dilaksanakan oleh pemerintah dan *public service* dapat dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan swasta maupun dilaksanakan oleh pihak swasta sendiri. *Civil servis* merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai warga Negara tanpa memandang kelas sosial ataupun besaran imbalan yang diberikan.

Adapun jenis-jenis pelayanan sebagai berikut:

a) Menjamin Keamanan Negara Pemerintah

ditugaskan untuk dapat membuat rakyatnya merasa aman dan juga dapat melindungi negaranya dari bahaya negara lain,

serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan sehingga masyarakat hidup dengan rasa aman dan tenang.

Menjamin Ketertiban

b) Fungsi ketertiban

merupakan usaha untuk mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat dan memberikan jaminan bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat akan berlangsung secara damai. Perwujudan fungsi pemerintah dalam hal ini yakni dengan adanya lembaga kepolisian, disamping peran birokrasi dan masyarakat

c) Menjamin Penerapan Keadilan

Adanya fungsi regulasi adalah menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan. Peraturan hukum yang telah ditetapkan perlu dilaksanakan dengan adil dan tidak memihak, sebagaimana dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1 dalam Susiowati (2017) semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Maka dari itu dijadikan acuan dalam merapkan hukum yang adil, tidak memandang status sosial maupun latar belakang seseorang.

d) Pekerjaan Umum Dan Pelayanan

Pekerjaan umum dan pelayanan merupakan Bidang pekerjaan yang tidak dilakukan oleh lembaga non-pemerintah atau bidang-bidang yang lebih baik dilakukan oleh pemerintah. Wujud

tugasnya adalah membangun jalan, menyediakan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas lainnya.

e) Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

Meningkatkan kesejahteraan sosial yakni pencapaian masyarakat yang adil dan makmur, dan mewujudkan kesejahteraan sehingga untuk melaksanakan upaya yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan pemerintah melakukan program dan kebijakan sosial.

f) Menerapkan Kebijakan Ekonomi

Dalam hal ini pemerintah bertugas untuk menetapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, misalkan mengendalikan inflasi, mendorong penciptaan lapangan pekerjaan baru, memajukan perdagangan domestik dan internasional, serta dengan kebijakan-kebijakan lain yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

g) Memelihara Sumber Daya Alam/Lingkungan

Pemerintah dalam pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan dengan berbagai fungsi, baik dalam regulasi, pemberdayaan maupun pelayanan. Dalam hal ini pemerintah membentuk suatu kebijakan atau aturan dalam pengelolaan lingkungan hidup

Menurut Purwaniangsih dalam Susiowati (2017), dalam melaksanakan peran dan fungsi pemerintah dapat menggunakan instrument sebagai berikut: a). Provinsi-provisi: Alokasi, Distribusi dan Subsidi; b). Subsidi; c). Produksi; d). pembuatan peraturan (*regulation*).

Dalam melakukan pelayanan dan pemberdayaan yang mengakibatkan terjadinya proses perubahan pada masyarakat, terdapat faktor pendorong yang menimbulkan suatu perubahan. Menurut Soerjono dalam Susiowati (2017) faktor pendorong sebagai berikut :

- a. Adanya hubungan dengan budaya lain
- b. Kemajuan sistem pendidikan
- c. Adanya pengakuan hasil karya
- d. Adanya rasa toleransi (*Deviation*)
- e. Keterbukaaan masyarakat
- f. penduduk yang heterogen
- g. Penerimaan masyarak dalam bidang-bidang baru
- h. Berorientasi pada masa depan

Dalam proses perubahan tidak selamanya hanya terdapat faktor pendorong, namun proses perubahan tedapat juga faktor penghambat yaitu sebagai berikut:

- a. Lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan.
- b. Masyarakat bersikap tradisional.
- c. Tertanamnya kepentingan dengan kuat.
- d. Berkurangnya interaksi antar masyarakat.
- e. Tidak menerima hal-hal baru.

- f. Ideologis yang bersifat penghambat.
- g. Adat atau kebiasaan.

Menurut Slamet dalam Susiowati (2017) adanya faktor penghambat dalam proses perubahan sosial adalah sebagai kekuatan pengganggu atau kekuatan bertahan yang ada didalam masyarakat. Kekuatan bertahan adalah kekuatan yang bersumber dari bagian masyarakat yang:

- a. Menolak bentuk perubahan;
- b. Menentang tipe perubahan tertentu;
- c. Kepuasan terhadap keadaan;
- d. Sumber perubahan bukanlah hal yang tepat;
- e. Kekurangan atau tidak tersedianya sumberdaya yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan yang diinginkan.

Adapun hambatan sebagai kekuatan pengganggu sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang memiliki kekuatan untuk bersaing dalam mendapatkan dukungan masyarakat lain dalam proses pembangunan;
- b. Keterlambatan dalam penerimaan perubahan oleh masyarakat;
- c. Kurangnya sumber daya dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Menurut *Kozier Barbara*, peran adalah suatu tingkah laku yang diharapkan oleh seseorang terhadap seseorang yang diinginkan mengikuti apa yang diinginkan. Peran ini bisa berasal dari dalam atau dari luar, dengan

cara stabil. Peran adalah suatu perilaku yang diharapkan terjadi pada seseorang di waktu sosial tertentu

Menurut Levinson (dalam Soekanto 2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi Peranan meliputi norma-norma yang berada sesuai dengan lingkungan seseorang. Norma-norma tersebut akan menjadi peraturan dan membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu hal atau konsep yang dihasilkan individu didalam berorganisasi
3. Peranan bisa juga diartikan suatu perilaku seseorang didalam masyarakat.

Menurut Parwoto (dalam Soehendy, 1997:28) mengemukakan bahwa peran serta mempunyai ciri-ciri:

1. Keterlibatan dalam keputusan : memilih keputusan dan menjalankan keputusan tersebut.
2. Bentuk kontribusi : ada beberapa contoh bentuk kontribusi seperti, ide, gagasan, konsep, dan lain sebagainya.
3. Organisasi kerja : berbagi tugas
4. Penetapan tujuan : ditetapkan kelompok bersama pihak lain.
5. Peran masyarakat : masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam peran.

Struktur Peran dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Peran Formal (Peran yang Nampak jelas)

Peran formal yang dimaksud disini adalah perilaku homogen disuatu tempat. Perilaku yang juga dilakukan didalam keluarga.

b. Peran Informal (Peran tertutup)

Sedangkan peran informal lebih kepada sifat emosional seseorang yang tidak dinampakkan keluar. Jika peran informal tersebut bisa dikendalikan dengan baik maka akan membantu peran formal.

2. Elit Politik

a. Peran Elit Politik

1. Pemerintah.
2. Penentu kebijakan.
3. Orang-orang yang mempunyai kekayaan.
4. Segelintir orang yang berhasil menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat.

b. Konsep Elit Politik

Garis besar perkembangan elit politik di Indonesia adalah dari yang bersifat tradisional yang berorientasi kosmologis dan berdasarkan keturunan kepada elit modern yang berorientasi kepada negara kemakmuran ,berdasarkan pendidikan. Elit modern ini jauh lebih beraneka ragam daripada elit tradisional. (Robert van Niel, 1984).

Menurut Arisoteles, elit adalah sebagian kecil masyarakat yang diberikan tanggung jawab atas tugas kemasyarakatan. Definisi elit yang dikatakan oleh Aristoteles merupakan penegasan lebih lanjut dari

pernyataan Plato dan kemudian dikembangkan lagi oleh dua orang sosiolog Italia, yakni Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca.

Pareto menyatakan bahwa setiap masyarakat dipimpin oleh segelintir masyarakat kecil yang mempunyai kemampuan yang baik dalam hal sosial dan politik. Masyarakat kecil yang disebut elit, yang mampu menjangkau pemerintahan. Elit adalah orang-orang berhasil yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto mengkerucutkan orang-orang elit adalah mereka yang mempunyai kekayaan, kepandaian, mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral dan sebagainya. Pareto membagi dua bagian dalam elit, pertama elit yang memerintah (*governing elite* / golongan elit) dan elit yang tidak memerintah (*non governing elite*), kedua lapisan rendah (*non elite*) kajian tentang elit politik lebih jauh dilakukan oleh Mosca, yang mengembangkan teori elit politik.

Menurut Mosca dalam semua masyarakat selalu mempunyai dua kelas, yakni kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang memerintah selalu lebih sedikit dari pada yang diperintah. Kelas pemerintah memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan. Kelas yang diperintah jumlahnya lebih besar, diatur dan dikontrol oleh pemerintah. Pareto dan Mosca mendefinisikan elit sebagai kelas penguasa yang secara efektif memonopoli pos-pos kunci dalam masyarakat. Definisi ini kemudian didukung oleh Robert Michels yang berkeyakinan bahwa “hukum besi

oligarki” tak terelakan. Dalam organisasi apapun, selalu ada kelompok kecil yang kuat, dominant dan mampu mendiktekan kepentingannya sendiri. Sebaliknya Lasswell berpendapat bahwa elit sebenarnya bersifat pluralistic. Sosoknya tersebar (tidak berupa sosok tunggal), orangnya sendiri berganti-ganti pada setiap tahapan fungsional dalam proses pembuatan keputusan, dan perannyapun bisa naik turun tergantung situasinya. Bagi Lasswell, situasi itu yang lebih penting, dalam situasi peran elit tidak terlalu menonjol dan status elit bisa melekat kepada siapa saja yang kebetulan punya peran penting.

Beberapa pakar yang pernah membahas tentang teori elit politik, seperti Laswell, Mills, dan Henri Comte. Teori ini bisa tercutus karena dalam politik masyarakat dibagi atas dua bagian, bagian pertama disebut masyarakat biasa dan masyarakat yang kedua disebut masyarakat elit. Seperti yang dikatakan oleh Laswell, elit politik adalah orang yang berkuasa dimasa itu, mereka memiliki kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan.

Selain Laswell ilmuwan yang pernah membahas tentang elit politik adalah Gaetano, menurut Gaetano masyarakat dibagi atas dua kelas, kelas yang pertama menguasai dan yang kelas kedua yang dikuasai. Penguasa lebih sedikit dari yang dikuasai. Elit politik merupakan bagian kecil dari penguasa, elit politik sangat berperan dalam kebijakan pemerintah dan kemana arah sebuah pemerintah akan berjalan.

3. Koalisi Partai Politik

Berkembangnya zaman maka berkembang pula pemikiran seseorang, sebelum munculnya teori koalisi banyak partai hanya menggunakan mesin partainya sendiri, hal ini tentu sangat kewalahan jika partai tersebut berada pada negara yang luas dan memiliki penduduk yang banyak dan ditambah bermacam agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Munculnya pemikiran tentang koalisi adalah suatu hal yang diperlukan oleh partai yang bertempat disuatu daerah yang bermacam ragam bentuknya, dan yang memiliki luas wilayah yang besar. Menurut Arend (1995:221) koalisi adalah suatu kelompok yang bergabung dengan kelompok lain, dengan orientasi saling menguntungkan.

Didalam politik koalisi sering diidentikkan penggabungan satu atau beberapa partai untuk mencapai suatu tujuan yang sama, konteks koalisi disini lebih sering diartikan dalam hal pemilihan kepala daerah dan presiden, koalisi partai bisa terjadi dinegara-negara yang menganut sistem presidensial. Bambang Cipto (2000:22) mengatakan koalisi dilakukan untuk menjadikan pemerintahan yang kuat. Hakikat sebuah koalisi ingin menjadikan pemerintahan yang kuat (strong), mandiri (autonomus), dan yang bertahan lama (durable).

Pemerintah yang dimaksud disini adalah pemerintah yang jika mengeluarkan suatu kebijakan tidak ada gejolak yang berarti didalam parlemen. Tetapi saat ini belum ada koalisi yang berhasil menjalankan koalisi seperti hakikatnya.

Koalisi yang sering ditemukan sering membingungkan ini terjadi kebiasaan elit partai hanya mengartikan koalisi hanya sementara dan untuk mencapai suatu hal tertentu bukan untuk memperbaiki pemerintahan.

Adapun beberapa bentuk koalisi yang ditulis dalam buku Efriza (2012) yang berjudul *Political Explore* sebuah kajian yang memperdalam tentang koalisi dan mengacu pada teori *Arend Lijphart* tentang beberapa bentuk koalisi, antara lain:

a) Koalisi berbasis ideologi

Teori ini lebih mengacu pada pentingnya suatu ideologi suatu partai, suatu partai yang menganut hal ini hanya akan berkoalisi jika ideologinya sama dan disetujui oleh elit partai. Menurut Ambardi dalam de Swan (1973) teori ini menyatakan hal ini akan berdampak terhadap kebijakan pemerintah dan meninggalkan ideologi partai dipemerintahan

b) Koalisi Kemenangan Minimal (minimal-winning coalition) Teori ini menyatakan prinsip dasar koalisi berada pada maksimalisasi kekuasaan dan meraih jabatan pemerintahan sebanyak mungkin. Teori kemenangan minimal ini beranggapan bahwa duduk di pemerintahan merupakan tujuan pokok partai karena akan memberi peserta koalisi keuntungan dari segi politik dan material.

Hal ini dilakukan dengan cara mencari sebanyak mungkin partai politik yang memperoleh kursi di kabinet untuk bergabung dan mengabaikan partai- 27 partai yang tidak perlu untuk diajak

berkoalisi. Dalam teori ini partai-partai bergabung membentuk koalisi dengan menghitung kemungkinan kemenangan suara terbanyak, yakni $50\% + 1$. Biasanya peserta koalisi akan berhenti menjadi rekan baru ketika perolehan kursi parlemen 50 persen telah terlampaui.

Kondisi ini dikemukakan oleh Ambardi dalam Riker (1962:33) yang menjelaskan bahwa peserta koalisi akan membentuk koalisi seminimal mungkin asal menjamin kemenangan dalam persaingan, dan tidak akan menambah peserta lagi. Dengan demikian keuntungan politik yang didapat dapat di distribusikan secara maksimal kepada peserta koalisi. Secara singkat peserta koalisi hanya berfokus pada suara yang dibutuhkan guna memenangkan pertarungan politik.

Dalam partai politik koalisi adalah hal yang wajar terjadi selain untuk memenangkan pasangan yang dicalonkan ini juga bisa menekan ongkos biaya besar untuk pencalonan. Koalisi menurut Yudha Hariwardana (2006), adalah persekutuan, aliansi, atau gabungan dari beberapa unsur. Koalisi biasanya terbentuk karena mempunyai kepentingan, dan hal ini dilakukan berlandaskan manfaat biasanya bersifat sementara. Adapun beberapa alasan partai yang akan berkoalisi :

1. Memudahkan memenangkan kandidat yang diusung oleh partai.
2. Mempunyai kepentingan yang sama.
3. Meringankan biaya kampanye untuk calon legislatif atau eksekutif.

Koalisi mempunyai sifat yang berbeda dari waktu ke waktu, seperti koalisi saat memenangkan calon kandidat kepala daerah akan ada partai yang berkoalisi, koalisi antar partai saat mengusung kandidat bisa saja berubah saat proses regulasi di DPRD, dimana partai yang berkoalisi pada pilkada berpaling dan mendukung partai yang sebelumnya menjadi lawan pada pilkada. Koalisi disuatu daerah dengan daerah lain akan berbeda karena kepentingan yang berbeda-beda, Sehingga bisa disimpulkan bahwasannya koalisi terbentuk tergantung pada kondisi dan kepentingan.

G. Defenisi Konsepsional

Beberapa defenisi operasional didalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Peran

Menurut *Kozier Barbara*, peran adalah suatu tingkah laku yang diharapkan oleh seseorang terhadap seseorang yang diinginkan mengikuti apa yang diinginkan. Peran ini bisa berasal dari dalam atau dari luar, dengan cara stabil. Peran adalah suatu perilaku yang diharapkan terjadi pada seseorang di waktu sosial tertentu.

2. Elit Politik

Menurut Mosca dalam semua masyarakat selalu mempunyai dua kelas, yakni kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang memerintah selalu lebih sedikit dari pada yang diperintah. Kelas

pemerintah memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan. Kelas yang diperintah jumlahnya lebih besar, diatur dan dikontrol oleh pemerintah. Pareto dan Mosca mendefinisikan elit sebagai kelas penguasa yang secara efektif memonopoli pos-pos kunci dalam masyarakat. Definisi ini kemudian didukung oleh Robert Michels yang berkeyakinan bahwa “hukum besi oligarki” tak terelakan. Dalam organisasi apapun, selalu ada kelompok kecil yang kuat, dominant dan mampu mendiktekan kepentingannya sendiri

3. Koalisi Partai Politik

menurut Yudha Hariwardana (2006), adalah persekutuan, aliansi, atau gabungan dari beberapa unsur. Koalisi biasanya terbentuk karena mempunyai kepentingan, dan hal ini dilakukan berlandaskan manfaat biasanya bersifat sementara.

4. Peran Elit Politik dalam Berkoalisi

1. Alat untuk memudahkan memenangkan kandidat yang diusung oleh partai.
2. Berkoalisi karena ideologi yang sama.
3. Dua atau beberapa partai yang mempunyai kepentingan yang sama.
4. Meringankan biaya kampanye.

H. Defenisi Operasional

Adapun beberapa indikator untuk melihat bagaimana peran elit politik dalam berkoalisi, antara lain sebagai berikut :

- 1) Alat untuk memudahkan memenangkan kandidat yang diusung oleh partai.
- 2) Berkoalisi karena ideologi yang sama.
- 3) Dua atau beberapa partai yang mempunyai kepentingan yang sama.
- 4) Meringankan biaya kampanye.

I. Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian” berasal dari kata ”Metode” jika diartikan adalah cara cepat untuk menghasilkan sesuatu, sedangkan ”Logos” memiliki makna ilmu atau pengetahuan sehingga metodologi adalah cara untuk menghasilkan sesuatu dengan ilmu atau pengetahuan yang ada (Cholid Nabuko & Abu Achmadi, 2015:1).

Sedangkan untuk ”Penelitian” adalah suatu kegiatan yang mencari, menganalisis, merumuskan, dan menjadikan sebuah laporan (Cholid Nabuko & Abu Achmadi, 2015:1).

Jadi metodologi penelitian bisa diartikan ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman (Cholid Nabuko & Abu Achmadi, 2015:1).

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu kejadian yang terjadi disekitar lingkungan manusia dan melalui proses yang panjang penelitian akan berkembang menjadi ide, teori dan konsep (Bahdin Nur Tanjung & Ardial, 2005:3).

Penelitian ini akan menggunakan penelitian analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengungkapkan suatu kejadian dengan cara holistik-konstektual dari hasil pengumpulan data dan latar alamidengan memanfaatkan penelitian sebagai instrument kunci (Bahdin Nur Tanjung & Ardial, 2005:3).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Provinsi Aceh tepatnya di Kabupaten Aceh Utara.

3. Jenis Data

a.Data primer

data primer adalah data yang sangat subjektif yang didapatkan dari narasumber yang bersangkutan dan belum diolah. Pwnulis menentukan data primer dengan cara "*Purposive Sampling*".

Teknik *purposive Sampling* menurut Cholid Nabuko & Abu Achmadi (2015;116) adalah proses mendapatkan data dari narasumber yang terlibat dalam penelitian yang dilakukan. Ciri-ciri dan sifat-sifat yang sangat jelas akan dijadikan kunci untuk pengambilan sampel.

Penelitian ini akan menggunakan teknik wawancara dan juga observasi sebagai data primer. Wawancara dijadikan data observasi dijadikan data primer karena hal ini sangat tepat, dipenelitian ini akan

melakukan wawancara dengan anggota Partai Aceh yang terlibat langsung dalam keputusan koalisi tersebut, observasi dilakukan agar memahami kondisi sebenarnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterima melalui pihak ketiga, sifat penelitian ini adalah subjektif karena sudah diolah. Data sekunder biasanya didapatkan dari hasil penelitian terdahulu, jurnal, dan karya ilmiah lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

wawancara digunakan untuk mendapat hasil yang mendalam tentang hal yang akan diteliti, wawancara diambil dari responden yang terkait dalam penelitian (Sugiyono, 2015:194).

Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara dari eli-elit politik di Kabupaten Aceh Utara yang diperkirakan terlibat dalam kebijakan partai Aceh dan dari partai Gerindra, Serta akan dilakukan wawancara dengan pengurus dari kedua partai, dan juga akan mewawancarai masyarakat apakah setuju dengan hal yang dilakukan partai Aceh karena partai Aceh representasi dari masyarakat Aceh.

Terakhir akan melakukan wawancara dengan tokoh politik yang berada di Kabupaten Aceh Utara serta dari orang-orang yang dirasa terlibat dalam hal yang akan diteliti tentang bagaimana pendapat

mengenai partai Aceh bergabung dengan partai nasional dalam pemilu 2014.

b. Dokumentasi

Untuk menunjang keberhasilan dalam penelitian yang dilakukan maka diperlukan dokumentasi berupa berita dari media cetak seperti koran, majalah, dan tulisan-tulisan yang pernah diberitakan. Hal ini dilakukan agar mengetahui dari awala bagaimana dinamika dalam koalisi yang dilakukan Partai Aceh dengan

Partai Gerindra.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data pada dasarnya merupakan sebuah proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga tema dapat ditemukan dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Menurut Miles dan Huberman dalam Sosiawati (2017) teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses pengumpulan data yang menggunakan beberapa teknik seperti wawancara, observasi yang hasilnya berupa data dari pendekatan hubungan dengan subjek penelitian.

b) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi bentuk tulisan atau *script* yang akan dianalisis.

c) Penyajian Data

Penyajian data adalah pengolahan data yang memiliki alur dan tema yang jelas (yang sudah disusun alurnya dalam tabel akumulasi tema) dalam bentuk tulisan kedalam suatu matriks sesuai tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan. Dalam penyajian data juga dilakukan interpretasi yang objektif berdasarkan temuan-temuan yang ada.

J. Sistematika Penulisan

Agar mudah dalam membuat penelitian maka diperlukan sistematika dalam penulisan, sistematika dalam penelitian antar lain sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab yang pertama ini akan membahas latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka dasar teori, definisi konseptual, definisi operasional, metode penelitian, dan serta sistematika penulisan.

BAB II Deskripsi Objek Penelitian

Di bab selanjutnya atau bab II akan fokus kepada sejarah dari peran elit yang berada di Kota Lhokseumawe, serta juga akan membahas profil kedua partai yang berkoalisi dalam pemilu tahun 2014.

BAB III Analisis

Pada bagian ini akan dilakukan analisis kepada tokoh elit serta pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan tentang koalisi dengan Partai Gerindra. Analisis dilakukan berdasarkan kriteria yang telah dijelaskan pada definisi operasional.

BAB IV Penutup

Bab ke IV sekaligus bab terakhir dalam penelitian ini membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, serta saran bagi tokoh elit di Kota Lhokseumawe untuk bisa memperbaiki politik di Aceh khususnya Kabupaten Aceh Utara.